

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia merupakan salah satu fokus penting untuk diperhatikan dalam sebuah negara, Pemerintah diharapkan mampu memberikan kebijakan dalam menjamin ekonomi masyarakatnya. Namun tak hanya pemerintah saja, masyarakat Indonesia juga diharapkan turut andil. Sejak adanya pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang cukup mengkhawatirkan bagi semua kalangan warga negara. Sehingga pemerintah memberikan upaya untuk memutus rantai penularan virus dengan berbagai kebijakan. “Namun berbagai upaya yang dilakukan sebagai pemutus rantai penularan virus justru telah menyebabkan perekonomian global menurun” (Muliati, 2020).

Pada penelitian Yamali & Putri (2020), menyebutkan “beberapa dampak ekonomi di Indonesia akibat pandemi covid-19 di antaranya ialah banyaknya pekerja yang diPHK besar-besaran dengan data yaitu kurang dari 1,5 juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK yang mana 90 persen pekerja dirumahkan dan pekerja yang diPHK sebesar 10 persen, penurunan impor sebesar 3,7 persen pada triwulan I, terjadi inflasi yang mencapai pada angka 2,96 persen dari tahun ke tahun yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020, pembatasan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan mencapai Rp. 207 miliar dan penurunan penempatan (*okupansi*) dari 6 ribu hotel

mencapai 50 persen yang dapat mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata”.

Dari penjelasan data tersebut, apabila dampak ini dibiarkan begitu saja, maka Indonesia akan mengalami krisis moneter yang dapat merugikan negara. Oleh sebab itu peran dari pemerintah maupun masyarakat sangat dibutuhkan untuk andil dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi yakni melalui peran dari UMKM. Menurut Arifqi (2021), “Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang disingkat menjadi UMKM merupakan sektor perekonomian mikro yang secara langsung bersentuhan dengan praktik perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat dengan skala perekonomian menengah ke bawah”.

Sehingga UMKM dijadikan sebagai salah satu pendongkrak bagi perekonomian di Indonesia. Pasalnya, dalam aktivitas UMKM tidak melibatkan sektor industri atau kerja sama dengan pihak luar negeri. UMKM adalah wujud dari kreativitas masyarakat Indonesia yang telah dikembangkan untuk diproduksi melalui penjualan. Banyak barang yang dihasilkan oleh UMKM yang menarik daya minat pembeli karena keunikan dari barang tersebut, bahkan sampai terkenal hingga ke luar negeri. Tidak salah apabila UMKM menjadi salah satu harapan besar untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia, sebagaimana yang dimuat dalam beranda Kadin.id:

Kadin.com, Jakarta – Data dan Statistik UMKM Indonesia. "Peran dari UMKM sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Di tahun 2023 pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta telah berkontribusi hingga mencapai 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang setara dengan Rp. 9.580T. UMKM menyerap sekitar 117 juta atau 97 persen pekerja dari total tenaga kerja.”

Sumber:(<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>) diakses pada

Jum'at, 25 Oktober 2024, 12.29 WIB.

Dalam berita yang dimuat juga dijelaskan bahwa pada tahun 2018 hingga 2023, jumlah UMKM di Indonesia telah mengalami pertumbuhan di tahun 2023 walaupun pada tahun sebelumnya telah menurun drastis yang kemungkinan akibat dari pandemi.

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0,70%	1,52%

Tabel 1.1 Data UMKM 2018-2023

Sumber data diolah: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia>

Selain itu Wahyuni (2020) juga mengungkapkan, “UMKM memiliki kekuatan besar yang dijadikan sebagai andalan dalam pengembangan perekonomian yang akan datang antara lain sebagai penyedia lapangan pekerjaan dalam industri kecil, sumber wirausaha baru yang terbukti telah mendukung tumbuh kembangnya kewirausahaan, dan mempunyai segmen pasar yang unik”. Begitu juga menurut Nurlida & Sinuraya sebagaimana dikutip dalam Indupurnahayu et al., (2022), “UMKM memiliki berbagai potensi yang dipengaruhi oleh sisi internal dan sisi eksternal”.

Potensi Internal	Potensi Eksternal
Total UMKM yang besar bisa menjadikan usaha semakin berkembang ke dalam skema rantai nilai dan pasok dalam proses bisnis sehingga produksi dan pemasaran bisa meningkat.	Kepastian hukum untuk perkembangan UMKM.
Sistem pengelolaan UMKM	Dapat menciptakan wirausaha

Potensi Internal	Potensi Eksternal
sederhana (fleksibel) sehingga memberikan kemudahan.	baru dengan adanya pendirian UMKM.
Harga produk UMKM mudah dijangkau oleh masyarakat.	Kemudahan dalam mengembangkan usaha karena mendapat dukungan dari pemerintah baik pusat dan daerah.
	Bertambahnya sumber tenaga kerja karena semakin meningkatnya usia produktif dengan keterampilan dan pendidikan yang tinggi seseorang.

Tabel 1.2 Potensi UMKM

Sumber : dikutip dalam jurnal (Indupurnahayu et al., 2022)

Berdasarkan paparan di atas dan tabel terkait potensi dari UMKM, dapat dijelaskan bahwa UMKM merupakan salah satu sumber yang dijadikan sebagai pendongkrak dalam memulihkan perekonomian di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya macam-macam potensi dari setiap UMKM. Sehingga penting untuk selalu menjaga kestabilan ekonomi dengan mengembangkan berbagai usaha dari para UMKM agar dapat menguntungkan depannya serta memberi manfaat bagi negara, khususnya pemerintah sebagai penyedia sarana dan fasilitas bagi pelaku usaha yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Namun seiring dengan kekuatan yang bisa diandalkan dari para UMKM, banyaknya jumlah UMKM di Indonesia juga mempunyai kelemahan atau tantangan sebagai problematika yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Berbagai macam tantangan yang dihadapi menjadikan kesulitan bagi UMKM dalam melakukan ekspor. Menurut (Rania & Prathama, 2022), “permasalahan pertama

terkait legalitas, banyak dari mereka yang belum terlalu paham akan pentingnya legalitas dalam usaha mereka. Kedua, masih banyak UMKM yang kesulitan memperoleh bantuan biaya dari lembaga keuangan atau perbankan. Ketiga minimnya bantuan bagi perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan persaingan global. Serta terakhir terkait dengan standarisasi produk yang menyebabkan kendala terhadap kualitas dari UMKM memasuki pasar global serta yang terakhir permasalahan tentang cara pemasaran yang masih terbatas dan kekurangan peluang pasar”.

Terkait permasalahan pendanaan UMKM, pemerintah telah memberikan perhatian yang serius salah satunya dengan membantu perluasan akses pembiayaan UMKM. “Namun yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan tersebut yakni masih banyak para UMKM yang belum memiliki perizinan usaha yang notabenenya merupakan salah satu persyaratan bagi peserta UMKM yang akan menerima pendanaan dari pemerintah” (Soimah & Imelda, 2023). Padahal dewasa ini, sebuah legalitas atau perizinan usaha amatlah sangat penting bagi mereka sebagai pelaku usaha terutama UMKM. Hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab dari sulitnya masyarakat untuk mengembangkan sebuah usahanya, sebagaimana yang terdapat pada berita yang dimuat oleh Liputan6.com oleh Tira Santia (2022):

"Liputan6.com, Jakarta - 60 Juta Pelaku Usaha di Indonesia Ternyata Belum Punya Izin. "Itu yang kami upayakan agar jumlahnya bertambah, data dari KemenkopUKM ada 65 juta pelaku UMKM. Sementara OSS yang sebelumnya kita sudah menerbitkan sekitar 4 juta berarti kalau ditotalkan (ditambah 1,5 juta) baru 5,5 juta NIB. Kalau 98 persennya adalah pelaku UMK berarti masih sekitar 5 juta artinya ada 60 juta lain belum punya NIB," jelasnya, Selasa (5/7/2022)."
Sumber:<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5006078/60-juta-pelaku->

[usaha-di-indonesia-ternyata-belum-punya-izin](#)) diakses pada Selasa, 5 Juli 2022, 18.15 WIB.

Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi kendala bagi UMKM di Indonesia, Pemerintah membuat kebijakan mengenai berbagai program yang membantu para pelaku usaha. Dikutip dalam (Wilfarda et al., 2021), “pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM diantaranya adalah memberikan perizinan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan bantuan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan daya saing usahanya, melakukan kegiatan untuk memberikan fasilitas, bimbingan dan pendampingan serta pengadaan koordinasi dan pengendalian dari pemerintah”.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemberdayaan UMKM, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam PP No. 7 Tahun 2021 pemerintah telah memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha. Perizinan usaha tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dan pemberian fasilitas tanpa dipungut biaya kepada pelaku usaha. Pelaku UMKM yang telah mengurus perizinan usaha mereka akan mendapatkan beberapa legalitas usaha di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi jaminan produk halal, dan sertifikat standar produk usaha lainnya.

Bagi UMKM suatu legalitas usaha sangat diperlukan dalam pembangunan nasional yang sedang mengalami kemajuan terutama pada aktivitas perekonomian. Menurut Redi et al., (2022), “dengan mempunyai legalitas usaha,

banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku UMKM antara lain usaha akan terlindungi, mendapatkan jaminan kepastian hukum, mudah memperoleh bantuan pendanaan dari pemerintah, dapat berpartisipasi secara konkret dalam peningkatan nilai produksi serta bisa mempromosikan usahanya lebih luas dalam lingkup nasional maupun internasional”.

Pemberdayaan UMKM di Indonesia dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan dilakukan secara terpadu bersama lembaga lainnya. “Pemerintah terus berupaya dengan melakukan berbagai strategi guna mendorong produk-produk UMKM agar semakin berkembang pesat di kancah pasar global” (Wulansari et al., 2021). Hal ini dilakukan, mengingat bahwa UMKM mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia sehingga dapat menjadi usaha yang tanggung dan mandiri. Sebagai salah satu bentuk strategi dari pemerintah untuk mengembangkan sebuah usaha dari UMKM yakni meningkatkan sebuah produk melalui kegiatan kurasi.

Menurut Sutantri & Haq (2023), “kurasi produk adalah proses menjaga dan mengelola suatu produk UMKM agar mampu untuk dikembangkan di kemudian hari”. Adapun manfaat dari kurasi produk antara lain memberi kepastian suatu produk memiliki standar mutu dan standar layak bagi konsumen, memahami kesesuaian dari proses produksi, bahan, harga dan desain kemasan produk, serta memahami potensi dari pengembangan produk usaha. “Secara singkat kurasi produk merupakan proses penyeleksian dari produk UMKM yang sudah terdaftar sebelum produk tersebut dinaikkan kelasnya atau diekspor” (Rania

& Prathama, 2022).

Kurasi dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, namun dalam kurasi perlu adanya pendampingan dari lembaga yang berwenang. Pendampingan kurasi produk UMKM sangat penting dilakukan karena mempunyai tujuan guna menembus pasar ekspor atau pasar modern. Menurut Ilham (2023), “melalui kurasi produk, pelaku UMKM akan memperoleh penilaian tentang produknya sehingga mereka akan menerima solusi untuk mengembangkan produk melalui pemenuhan kriteria dari aspek legalitas, kemasan, maupun kualitas”. “Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM untuk mampu masuk ke pasar global” (Rania & Prathama, 2022).

Sehingga pemerintah semakin fokus pada UMKM untuk melakukan strategi agar produk lokal Indonesia mampu merambah ke sektor pasar global melalui program yang diluncurkan seperti program kurasi. Salah satu lembaga pemerintah yang menginisiasi program kurasi produk UMKM yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat juga bahwa UMKM di Jawa Timur cukup memberikan berbagai potensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dikutip dalam penelitian Rania & Prathama (2022), mengungkapkan bahwa “Provinsi Jawa Timur memiliki letak strategis karena posisinya terletak di tengah Indonesia dimana provinsi tersebut memiliki potensi untuk membangun perindustrian dan usaha sehingga menyebabkan UMKM mudah tersebar”.

Sebagai salah satu bentuk potensi yang diberikan oleh UMKM di Jawa Timur yakni telah berkontribusi besar dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Menurut Anugerah & Nuraini (2021),

“pertumbuhan UMKM Jatim telah memperlihatkan adanya peningkatan yang sempurna”. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang dimuat kominfo.jatimprov.go.id (2024), menjelaskan bahwa "pada triwulan 1-2024, provinsi Jawa Timur menjadi peringkat kedua sebagai penyumbang kontribusi perekonomian Indonesia khususnya Pulau Jawa sebesar 25,07% dengan pertumbuhan 4,81%” .

Peringkat	Nama Provinsi	Kontribusi PDRB
1	DKI Jakarta	29,39%
2	Jawa Timur	25,07%
3	Jawa Barat	22,42%
4	Jawa Tengah	14,60%
5	Banten	6,97%
6	Yogyakarta	1,57%

Tabel 1.3 Peringkat Penyumbang Kontribusi PDRB Pulau Jawa

Sumber data diolah : kominfo.jatimprov.id (2024)

Kontribusi ini merupakan salah satu hasil dari jumlah UMKM yang mengalami peningkatan pertahun kemudian memberikan hasil pertumbuhan pada PDRB dari 2020 hingga 2023. Tercatat pada tahun 2020 1.316 T (57,25%), meningkat pada 2021 sebanyak 1,418,9 T (57,81%), tahun 2022 kembali meningkat 1,593,67 T (58,36%), di tahun 2023 meningkat sebesar (59,18%) dengan sebanyak 9.850 T kontribusi UMKM terhadap PDRB Jatim".

"Jatim Newsroom - Jatim Penyumbang Perekonomian Terbesar Kedua di Pulau Jawa "UMKM berperan besar terhadap perekonomian di Indonesia khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. UMKM didominasi usaha mikro sebesar 99,74% sebanyak 1,537 juta, usaha kecil 0,23% sebanyak

3.460 dan usaha menengah 0,04% sebanyak 570", ujar Susanti."

Sumber: (Berita Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur).

1.	Jawa Tengah	862.926	14.	DKI Jkt	80.622	27.	Bengkulu	26.531
2.	Jawa Timur	862.057	15.	Sumsel	77.216	28.	Kep. Riau	26.267
3.	Jawa Barat	641.639	16.	Sulteng	76.129	29.	Sulbar	22.488
4.	NTB	149.962	17.	Kalsel	67.370	30.	Maluku Ut	17.338
5.	DIY	134.025	18.	Riau	62.363	31.	Kep. Bangka	16.262
6.	Sumut	126.907	19.	Maluku	61.507	32.	Papua	13.416
7.	NTT	125.940	20.	Sulut	60.961	33.	Kalut	5.970
8.	Bali	125.787	21.	Sultengg	49.153	34.	Papua Barat	5.837
9.	Sulsel	123.926	22.	Kalbar	48.456			
10.	Aceh	110.526	23.	Gorontalo	38.925			
11.	Banten	97.092	24.	Kaltim	35.641			
12.	Sumbar	88.221	25.	Jambi	34.534			
13.	Lampung	81.255	26.	Kalteng	28.551			

Tabel 1.4 Jumlah UMKM Per-Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber data diolah : BPS Indonesia (2024)

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut menjelaskan terkait jumlah UMKM yang ada di Indonesia pada periode tahun 2023. Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua dengan jumlah unit UMKM terbanyak dari setiap provinsi di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Jatim sebagaimana dikutip oleh Anggraeny (2020), "UMKM di Jatim, didominasi oleh industri makanan dan minuman yakni sebesar 60%, produk fashion sebesar 30% dan sisanya kriya atau semacam souvenir (perhiasan dan pernik)".

Dari data-data tersebut, diketahui bahwa Jawa Timur mempunyai potensi cukup besar dalam membantu pemulihan perekonomian di Indonesia melalui UMKM. Dengan banyaknya jumlah UMKM yang di Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan juga kontribusi PDRB yang dihasilkan. Sehingga Provinsi Jawa Timur menduduki posisi peringkat kedua juga dari provinsi lainnya sebagai penyumbang terbesar perekonomian yang ada di Pulau Jawa karena adanya

kontribusi UMKM terhadap PDRB Jatim.

Dikutip dalam berita yang dimuat oleh kominfo.jatimprov.go.id, "di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, pemerintah telah menuntut para UMKM untuk selalu berinovasi sebagai salah satu perwujudan dalam meningkatkan daya saing UMKM. Upaya strategis yang dilakukan salah satunya dengan penerapan standar kualitas yang baik terhadap produk inovasinya. Pasalnya seringkali permasalahan yang dilakukan oleh para UMKM mengacu terhadap penerapan standar kualitas seperti melakukan pengendalian kualitas dengan berdasarkan pengalaman, pedoman kerja yang belum ditetapkan dan proses kerja yang tidak terstruktur". Dengan hal itu untuk kedepannya, pemerintah memberikan upaya yang dapat membantu para UMKM agar bisa mengembangkan dan bersaing dari masing-masing produk mereka ke kancah global salah satunya melalui adanya kegiatan kurasi tersebut.

Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) telah menyelenggarakan kegiatan kurasi produk bagi para pelaku UMKM di seluruh Jawa Timur. Kegiatan kurasi dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM Jatim untuk menilai standarisasi dan kualitas produknya, sehingga dapat menjadi pertimbangan dasar pemberian fasilitasi yang tepat serta menjamin mutu kelayakan produk UMKM untuk dipasarkan di luar negeri. Dalam proses kegiatan kurasi, banyak tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari tahap pendaftaran hingga proses kelulusan.

Kegiatan kurasi produk yang diselenggarakan oleh Diskop UKM Jatim

sebagai panitia kurasi diawali dengan tahap pendaftaran dengan cara memberikan informasi kepada seluruh pelaku UMKM Jatim terkait pendaftaran kegiatan kurasi melalui *google form* yang telah disebar di media sosial. Peserta dapat diikuti oleh seluruh pelaku UMKM yang berminat mengikuti program kurasi di Jawa Timur dan mempunyai legalitas usaha atau persyaratan kurasi. Dari banyaknya pendaftar, hanya beberapa pendaftar yang akan diikuti pada kegiatan kurasi sesuai hasil seleksi dari formulir pendaftaran.

Kegiatan kurasi produk pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di ruang rapat Aria Wiriadtmaja. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut panitia selaku kurator memberikan pemaparan terkait kurasi produk UMKM yang diawali dengan penjelasan persyaratan yang wajib dimiliki oleh seorang pelaku usaha UMKM meliputi legalitas produk usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), Sertifikasi Halal, SNI dan sebagainya. Selain itu persyaratan penilaian terkait dengan kualitas produk seperti desain kemasan, cita rasa, kadungan nutrisi serta promosi penjualan.

Kegiatan kurasi produk tentunya tak terlepas dari suatu kendala atau masalah yang menjadi penyebab kurang optimalnya kegiatan. Pada kurasi yang diselenggarakan oleh Diskop UKM Jatim, peneliti telah menemukan beberapa masalah terhadap proses penyeleksian para peserta kurasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada penyelenggaraan kurasi produk di Diskop UKM Jatim, proses penyeleksian peserta di tahap awal dilakukan dengan cara manual yakni salah satu panitia memilih beberapa peserta yang akan maju ke tahap selanjutnya

yakni pembinaan kurasi. Peserta yang dipilih ialah hasil selera dari panitia yang dirasa baik menurut pilihannya. Apabila dilihat berdasarkan hasil formulir pendaftaran, banyak peserta yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan namun tidak lolos untuk mengikuti pembinaan ke tahap berikutnya begitu pula sebaliknya.

Jumlah peserta yang mendaftar pada kegiatan kurasi produk yang diselenggarakan Diskop UKM Jatim yakni 85 pendaftar, namun peserta yang lolos hanya 50 dan tidak lolos tersisa 35. Dari data tersebut terdapat peserta yang mempunyai legalitas yang mendukung namun tidak lolos sedangkan peserta yang minim legalitas bisa diloloskan. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurasi menjadi tidak efektif dikarenakan pemilihan peserta yang tidak tepat sasaran. Sehingga ketika pelaksanaan kurasi pada tahap pembinaan banyak pelaku UMKM yang tidak lolos untuk menempuh ke tahap selanjutnya dikarenakan mereka tidak memiliki izin usaha. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan pada proses penyaringan peserta yang dilakukan di tahap sebelumnya.

Selain itu penelitian sebelumnya dalam Rania & Prathama (2022), telah menjelaskan terkait hasil dari kurasi produk UMKM, “adanya kurasi produk tersebut telah berhasil membantu para pelaku UMKM memasarkan produknya lebih luas hingga ke luar negeri namun yang menjadi masalah ialah omset yang mereka hasilnya belum terlihat mengalami peningkatan”. Peneliti juga menemukan indikasi pada saat melakukan observasi awal dalam pra riset di Diskop UKM Jatim, yakni ada salah satu pegawai yang mengungkapkan bahwa kegiatan kurasi produk yang diadakan oleh pihak Diskop UKM Jatim masih

dinilai belum sempurna karena tidak memberikan output yang nyata setelah diadakannya kegiatan kurasi.

Dalam hal ini, strategi pemerintah sangat diperlukan dalam program Kurasi Produk UMKM di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan program kurasi menjadi lebih optimal serta menghasilkan output yang bermanfaat bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menetapkan judul "**Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam Optimalisasi Kurasi Produk UMKM Guna Menembus Pasar Global**".

1.2 Rumusan Masalah

Dengan dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam Optimalisasi Kurasi Produk UMKM Guna Menembus Pasar Global?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan terkait Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam Optimalisasi Kurasi Produk UMKM Guna Menembus Pasar Global.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kepedulian akademisi terhadap persoalan terkait Strategi Diskop UKM Jatim dalam Optimalisasi Kurasi Produk UMKM Guna

Menembus Pasar Global.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini bermanfaat sebagai penunjang pendidikan dan bahan pembandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Pemerintah Provinsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangsih pemikiran kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mengenai hal-hal yang harus diperhatikan demi kesuksesan pelaksanaan kurasi produk UMKM Jawa Timur.

3. Bagi pelaku UMKM Provinsi Jawa Timur

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi kepada pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk lebih memanfaatkan program kurasi produk yang sudah diberikan pemerintah provinsi guna meningkatkan perekonomian Indonesia sekaligus mengembangkan produknya agar mampu merambah ke sektor pasar global.